



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**BIRO HUKUM**

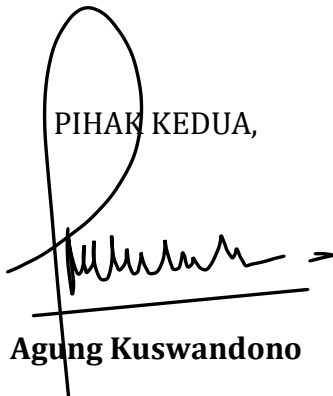
---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

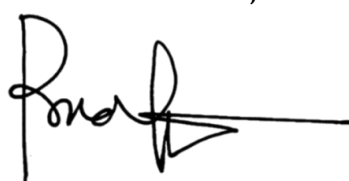
1. Nama : Budi Purwanto  
Jabatan : Kepala Biro Hukum  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Agung Kuswandono  
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,  
  
Agung Kuswandono

Jakarta,     Maret 2020

PIHAK PERTAMA,  
  
Budi Purwanto

**LAMPIRAN I**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KEPALA BIRO HUKUM**

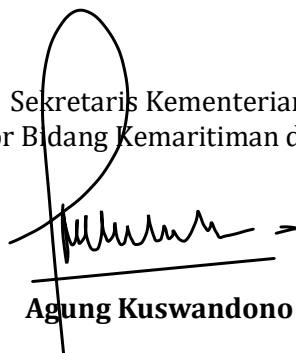
**TARGET KINERJA TAHUN 2020**  
**BIRO HUKUM, SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
Stakeholder Perspective				
SS.1	Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik	1	Indeks Penilaian Mandiri Pengelolaan Reformasi Birokrasi	80
Customer Perspective				
SS.2	Pelayanan Publik yang Prima	2	Persentase Kepuasan atas Layanan Biro Hukum	90%
Internal Business Process Perspective				
SS.3	Terwujudnya penguatan koordinasi dan peningkatan fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan	3	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenko Marves	1
		4	Persentase peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenko Marves yang diharmonisasi/difinalisasi	80%
		5	Persentase naskah hukum di lingkungan Kemenko Marves yang ditetapkan	80%
		6	Persentase peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenko Marves, peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman dan investasi, dan naskah hukum di lingkungan Kemenko Marves yang dievaluasi	80%
		7	Persentase peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman dan investasi yang difasilitasi dan dikoordinasikan	80%
SS.4	Terwujudnya pelaksanaan Advokasi dan pengelolaan Informasi Hukum di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang baik	8	Persentase Advokasi Hukum di lingkungan Kemenko Marves yang Responsif	100%
		9	Persentase dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kemenko Marves yang diinformasikan	100%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
SS.5	Pengelolaan Kerja Sama yang Berkualitas	10	Persentase MoU Luar Negeri yang Ditindaklanjuti	60%
		11	Persentase MoU Dalam Negeri yang ditindaklanjuti	60%
SS.6	Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas	12	Persentase Penyelesaian Dokumen Organisasi dan Tata Laksana (Peta Proses Bisnis, Anjab, Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan)	100%
		13	Persentase Implementasi SOP di unit kerja	75%
		14	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%

KEGIATAN	ANGGARAN
Pengelolaan Hukum, Advokasi, Kerja Sama dan Organisasi	Rp6.830.796.000

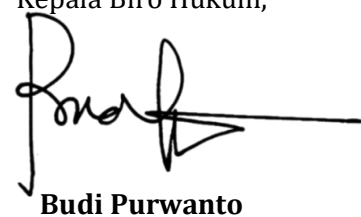
Sekretaris Kementerian  
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,



**Agung Kuswandono**

Jakarta,     Maret 2020

Kepala Biro Hukum,



**Budi Purwanto**

**LAMPIRAN II**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KEPALA BIRO HUKUM**

**RINCIAN DATA KINERJA TAHUN 2020**  
**BIRO HUKUM, SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR**


NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA/HASIL KINERJA	TARGET TAHUNAN	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
				I	II	III	IV
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>							
1	Indeks Penilaian Mandiri Pengelolaan Reformasi Birokrasi	Penilaian Mandiri Pengelolaan Reformasi Birokrasi	80				80
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>							
2	Persentase Kepuasan atas Layanan Biro Hukum	Kepuasan atas Layanan Biro Hukum	90%				90%
<b>INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE</b>							
3	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenko Marves	Dokumen Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator	1		1		
4	Persentase peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenko Marves yang diharmonisasi/difinalisasi	Harmonisasi/finalisasi Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator (P3MK)	80%	20%	40%	60%	80%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA/HASIL KINERJA	TARGET TAHUNAN	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
				I	II	III	IV
5	Persentase naskah hukum di lingkungan Kemenko Marves yang ditetapkan	Naskah hukum di lingkungan Kemenko Marves yang ditetapkan	80%				80%
6	Persentase peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenko Marves, peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman dan investasi, dan naskah hukum di lingkungan Kemenko Marves yang dievaluasi	Peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenko Marves, peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman dan investasi, dan naskah hukum di lingkungan Kemenko Marves yang dievaluasi	80%				80%
7	Persentase peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman dan investasi yang difasilitasi dan dikoordinasikan	Peraturan Perundang-undangan di bidang kemaritiman dan investasi yang difasilitasi dan dikoordinasikan	80%				80%
8	Persentase Advokasi Hukum di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Responsif	Penyusunan Penelaahan Hukum	100%				100%
9	Persentase dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kemenko Marves yang diinformasikan	Dokumentasi dan informasi di lingkungan Kemenko Marves yang diinformasikan	100%				100%
10	Persentase MoU Luar Negeri yang Ditindaklanjuti	MoU Luar Negeri yang Ditindaklanjuti	60%	15%	30%	45%	60%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA/HASIL KINERJA	TARGET TAHUNAN	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
				I	II	III	IV
11	Persentase MoU Dalam Negeri yang Ditindaklanjuti	MoU Dalam Negeri yang ditindaklanjuti	60%	15%	30%	45%	60%
12	Persentase Penyelesaian Dokumen Organisasi dan Tata Laksana (Peta Proses Bisnis, Anjab, Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan)	Dokumen Organisasi dan Tata Laksana (Peta Proses Bisnis, Anjab, Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan) yang Diselesaikan	100%		40%		100%
13	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan	100%				100%
14	Persentase Implementasi SOP di unit kerja	Implementasi SOP di unit kerja	75%			75%	

Jakarta,        Maret 2020

Kepala Biro Hukum,

  
Budi Purwanto